

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, Februari 2020
Sekretaris,

dto

SAMSIR TOONA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
Pengungkapan Penting Lainnya	52
Lampiran dan Daftar	



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: 402072.papbr@gmail.com

PEKANBARU – RIAU 28289

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, Februari 2020

Sekretaris,

dto

SAMSIR TOONA

NIP 19780312 20031003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.546.560,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp12.268.932.706,00 atau mencapai 99,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.309.907.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.609.607.980,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.174.925,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29.605.589.998,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.843.057,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.431,980,00 dan Rp29.608.176.000,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp12.868.574.802,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp12.856.746.742,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.191.424,00 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp12.853.555.318,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp29.958.419.572,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp12.853.555.318,00). ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.503.311.746,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp29.608.176.000,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	18,546,560	-	45,457,419
JUMLAH PENDAPATAN		-	18,546,560	-	45,457,419
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	10,946,415,000	10,942,264,878	99.96	12,547,238,218
Belanja Barang	B.4	1,260,992,000	1,224,167,828	97.08	1,140,338,270
Belanja Modal	B.5	102,500,000	102,500,000	100.00	386,642,130
JUMLAH BELANJA		12,309,907,000	12,268,932,706	99.67	14,074,218,618

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	6.448.560
Persediaan	C.3	2.174.925	1.540.300
Jumlah Aset Lancar		2.174.925	7.988.860
ASET TETAP			
Tanah	C.4	18.399.971.000	18.399.971.000
Peralatan dan Mesin	C.5	3.354.881.628	2.999.456.028
Gedung dan Bangunan	C.6	10.950.485.240	10.950.485.240
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	68.696.200	68.696.200
Aset Tetap Lainnya	C.8	977.900	977.900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(3.169.421.970)	(2.485.416.892)
Jumlah Aset Tetap		29.605.589.998	29.934.169.476
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	8.881.972	8.881.972
Aset Lain-Lain	C.11	14.950.000	303.397.830
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(21.988.915)	(290.037.005)
Jumlah Aset Lainnya		1.843.057	22.242.797
JUMLAH ASET		29.609.607.980	29.964.401.133
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada piha ketiga	C.13	329.480	3.776.561
Pendapatan diterima dimuka	C.14	1.102.500	2.205.000
Uang muka dari KPPN	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	5.981.561
JUMLAH KEWAJIBAN		1.431.980	5.981.561
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	29.608.176.000	29.958.419.572
JUMLAH EKUITAS		29.608.176.000	29.958.419.572
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.609.607.980	29.964.401.133

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TH 2019	TH 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.828.060	35.990.480
JUMLAH PENDAPATAN		11.828.060	35.990.480
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10.947.751.757	12.526.547.600
Beban Persediaan	D.3	70.279.879	53.807.200
Beban Barang dan Jasa	D.4	797.917.615	717.739.227
Beban Pemeliharaan	D.5	317.746.882	320.803.902
Beban Perjalanan Dinas	D.6	39.822.781	39.360.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	695.055.888	674.292.082
JUMLAH BEBAN		12.868.574.802	14.332.550.011
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.856.746.742)	(14.296.559.531)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	D.8	7.821.000	-
Beban pelepasan Aset Non Lancar	D.9	9.348.930	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(1.527.930)	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.10	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	5.671.179	8.273.039
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	951.825	592.500
Operasional Lainnya		4.719.354	7.680.539
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.191.424	7.680.539
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.15	-	-
Surplus/ (defisit) Dari Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(12.853.555.318)	(14.288.878.992)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	29.958.419.572	29.535.445.925
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.853.555.318)	(14.288.878.992)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(51.835.800)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		12.503.311.746	14.763.688.439
Setoran Surplus BLU	E.4		-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(350.243.572)	422.973.647
EKUITAS AKHIR	E.6	29.608.176.000	29.958.419.572

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu dari 359 peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai konsekuensi dari dijadikannya Pekanbaru sebagai ibu kota Kota Pekanbaru karena Pengadilan Agama berada dalam Kota atau Kabupaten yang wilayah hukumnya adalah Kota atau Kabupaten.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses oleh publik.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015–2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA

BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

Sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan ini berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2018 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 658/PB/2018 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 617/PB/2018 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c.Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat

dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
----------------------------	----------------------

Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Pengadilan Agama Pekanbaru** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya estimasi belanja langganan daya dan jasa khususnya langganan listrik yang diperkirakan tidak mencukupi sampai dengan Desember 2019 serta adanya penambahan anggaran dari BA-BUN untuk belanja langganan daya dan jasa khusus langganan internet, bantuan sewa rumah dinas untuk hakim serta penambahan laptop hakim dan Perjalanan Dinas dalam hal ini kewenangan dari Eselon I. Selain itu juga revisi pagu minus belanja pegawai. Adapun rincian revisi tersebut belanja antara lain:

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja		
Belanja Pegawai	13,069,467,000	10,946,415,000
Langganan Listrik	174,704,000	247,574,000
Langganan Internet	85,200,000	140,500,000
Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	0	12,000,000
Belanja Modal Laptop Hakim	65,000,000	102,500,000
Belanja Tambahan Perjalanan Dinas	20,070,000	45,070,000
Jumlah Belanja	13,414,441,000	11,494,059,000

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp18.182.560,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.182.560,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TA 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatann dari penjualan peralatan dan mesin	-	7,821,000	-
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	-	4,277,000	-
Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	6,448,560	-
Jumlah	-	18,546,560	-

Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Pekanbaru periode Tahun 2019 mengalami penurunan 40,80 persen dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena pada Tahun 2019 tidak ada pegawai yang mengambil uang muka/persekot gaji, sedangkan pada tahun 2018, ada persekot gaji yang dibayarkan sekaligus.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	7,821,000	-	0.00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	4,277,000	3,703,000	15.50
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	6,448,560	32,287,480	-80.03
Jumlah	18,546,560	35,990,480	-48.47

Realisasi Belanja Negara
Rp12,268,932,706

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp9.Rp12,268,932,706 atau 99,67% dari anggaran belanja sebesar Rp12,309,907,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10,946,415,000	10,942,264,878	99.96
Belanja Barang	1,260,992,000	1,224,167,828	97.08
Belanja Modal	102,500,000	102,500,000	100.00
Total Belanja Kotor	12,309,907,000	12,268,932,706	99.67
Pengembalian		(266,782)	-
Jumlah	12,309,907,000	12,268,665,924	99.66

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,83% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan prosentase realisasi, maka TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,75%. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya mutasi Hakim dan Pegawai serta pensiun. Disamping itu pula belanja modal pada tahun 2019 terbatas hanya untuk pengadaan Laptop Hakim saja.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10,942,264,878	12,547,238,218	(12.79)
Belanja Barang	1,224,167,828	1,140,338,270	7.35
Belanja Modal	102,500,000	386,642,130	(73.49)
Jumlah	12,268,932,706	14,074,218,618	(12.83)

Belanja Pegawai

Rp10.942.264.878

,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.942.264.878,00 dan Rp12.547.238.218,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Realisasi belanja Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12.79 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan gaji PNS pada tahun 2019.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3,422,991,940	3,656,442,700	(6.38)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	44,686	42,708	4.63
Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	273,860,174	283,409,804	(3.37)
Belanja Tunj. Anak PNS	73,969,705	78,687,761	(6.00)
Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,333,620,000	6,503,520,000	(17.99)
Belanja Tunj. PPh PNS	814,086,515	975,239,890	(16.52)
Belanja Tunj. Beras PNS	144,260,640	161,496,600	(10.67)
Belanja Uang Makan PNS	493,083,000	572,955,000	(13.94)
Belanja Tunjangan Umum PNS	18,245,000	28,420,000	(35.80)
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	328,050,000	398,250,000	(17.63)
Jumlah Belanja Kotor	10,942,531,660	12,698,784,463	(13.83)
Pengembalian Belanja Pegawai	266,782	151,546,245	(99.82)
Jumlah Belanja	10,942,264,878	12,547,238,218	(12.79)

Belanja Barang

Rp1.224.167.828

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,224,167,828 dan Rp1,140,338,270. Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 mengalami kenaikan 5,89% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang khususnya belanja langganan daya dan jasa khususnya listrik dan internet. Dengan bertambahnya jumlah peralatan dan mesin maka pemakaian arus listrik juga meningkat dan tagihan listrikpun makin meningkat. Selain itu juga, belanja persediaan juga semakin

meningkat seiring dengan banyaknya keperluan ATK yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Demikian juga dengan perjalanan dinas, kegiatan terkait dengan pembangunan zona integritas tahun 2019 ini begitu intens sehingga belanja perjalanan dinas pun meningkat. Selain itu juga, tahun 2019 ada belanja barang berupa bantuan sewa rumah dinas hakim.

Perbandingan Belanja Tahun 2019 dan
2018

URAIAN	REALISASI TA2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	427,956,206	452,679,048	(5.46)
Belanja Pengiriman Surat Dinas	2,956,500	3,559,500	(16.94)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44,280,000	44,819,000	(1.20)
Belanja Barang Operasional Lainnya	46,180,790	26,071,693	77.13
Belanja Bahan	489,250	390,750	100.00
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	83,628,308	73,899,100	100.00
Belanja Langganan Listrik	231,568,012	197,083,228	17.50
Belanja Langganan Telepon	2,472,257	3,067,807	(19.41)
Belanja sewa	44,500,000	0	100.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,126,215	191,083,228	(17.25)
Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	124,187,509	107,081,874	15.97
Belanja Perjalanan Biasa	38,472,781	35,310,000	8.96
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	4,050,000	(66.67)
Jumlah Belanja	1,206,167,828	1,139,095,228	5.89

Belanja Modal
Rp102.500.000,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp102.500.000,00 dan Rp343.877.430,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 164,89% dibandingkan TA 2018 disebabkan oleh berkurangnya anggaran belanja modal TA. 2019 dibandingkan dengan 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102,500,000	291,958,130	(64.89)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	94,684,000	(100)
Jumlah Belanja	102,500,000	386,642,130	(164.89)

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran untuk belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp102.500.000,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar Rp102.500.000,00, mengalami penurunan sebesar 29,78 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp291,958,130,00. Hal ini disebabkan oleh belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2019 terbatas hanya untuk pengadaan laptop hakim saja yang jumlahnya 8 unit dengan anggaran senilai Rp102.500.000,00 dibanding TA 2018 anggaran belanja modal peralatan dan mesin mencapai Rp292.019.000,.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102,500,000	291,958,130	35.11
Jumlah Belanja Kotor	102,500,000	291,958,130	-64.89
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	102,500,000	291,958,130	-29.78

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp94.684.000,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan pada TA. 2019 tidak ada anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	94,684,000	-100.00
Jumlah Belanja	-	94,684,000	-100.00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

<i>Belanja Modal Lainnya Rp0</i>	B.5.5 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.
<i>Belanja Bantuan Sosial Rp0</i>	B.6 Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 masing-masing Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran Rp30.000.000,00</i>	C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
---	--

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 dan 2018

Keterangan	TA. 2019	TA. 2018
Uang Tunai	-	-
Kuitansi Yang Belum di-SP2D-kan	-	-
Jumlah	-	-

Kas di

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara
Penerimaan
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp0. Selain itu juga Pengadilan Agama Pekanbaru tidak memiliki rekening bendahara penerimaan.

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0.

Piutang
PNBP Rp0

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Bagian Lancar
TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0.

Belanja
Dibayar di
Muka Rp0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp6.448.560,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Tahun 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pembayaran persekot/uang muka gaji	-	6,448,560
Jumlah	-	6,448,560

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan
Rp2,174,925,00

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2,174,925,00 dan Rp7,988,860,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	5,170,388	1,121,300
Bahan Untuk Pemeliharaan	212,700	419,000
Jumlah	5,383,088	1,540,300

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp18.339.971.00
0,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama

Pekanbaru per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp18.339.971.000,00 dan Rp18.339.971.000,00.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai Perolehan
1	100 m2	Jl. Kesadaran	54,800,000
2	844 m2	Jl. Kesadaran	480,000,000
3	9.542 m2	Jl. Nurul Amal Kel. Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru	1,196,742,380
4	274 m2	Jl. Kembang Sari Kel. Cinta Raja Kec. Sail, Pekanbaru	341,130,000
5	400 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	80,000,000
6	1.250 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	316,750,000
7	3.892 m2	Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Pekanbaru	915,780,000
8	400 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	101,410,000
9	1.250 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	316,750,000
10	1.000 m2	Jl. Bunga Kertas No. 21 Kel. Kedung Sari, Pekanbaru	1,217,650,000
11	1.181 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	301,089,200
12	1.188 m2	Jl. Rawa Indah No. 1 Kota Pekanbaru	301,089,200
Jumlah			5,623,190,780

Peralatan dan C.15 Peralatan dan Mesin

Mesin

Rp3,354,881,628,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp3,354,881,628,00 dan Rp2,999,456,028,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:	
Pembelian	102,500,000
Hibah Barang	91,890,000
Transfer Masuk	161,035,600
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	3,354,881,628
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(2,453,907,705)
Nilai Buku per 31 Desember2019	900,973,923

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Laptop senilai Rp102.500.000,00; dan
- b. Hibah langsung berupa Peralatan dan Mesin dan alat pengolah data senilai Rp91,890,000,00.
- c. Transfer masuk perangkat pendukung SIPP senilai Rp161,035,600,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp10.950.485.24
0,00

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp10.950.485.240,00 dan Rp10.950.485.240,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	10,950,485,240
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	10,950,485,240
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(696,851,975)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	10,253,633,265

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp68.696.200,0
0

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp68.696.200,00 dan Rp68.696.200,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	68,696,200
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	68,696,200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(18,662,290)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	50,033,910

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp1,843,057

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp1,843,057 dan Rp22,242,797. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset

tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	977,900
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2019	977,900
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	977,900

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(3,169,421,970)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(3,169,421,970) dan Rp(2,485,416,892). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3,354,881,628	2,453,907,705	900,973,923
2	Gedung dan Bangunan	10,950,485,240	696,851,975	10,253,633,265
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	68,696,200	18,662,290	50,033,910
4	Aset Tetap Lainnya	977,900	0	977,900
Akumulasi Penyusutan		14,375,040,968	3,169,421,970	11,205,618,998

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp1,843,057

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp1,843,057 dan Rp8,881,972 .

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Pekanbaru berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8,881,972
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2019	8,881,972
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(7,038,915)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1,843,057

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai Perolehan
Sofwere	8.881.972
Jumlah	8.881.972

Aset Lain-
Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp0 dan Rp19,171,034. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	19,171,034
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	4,221,034
Saldo per 31 Desember 2019	14,950,000
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	(14,950,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(21,988,915)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(21,988,915) dan Rp(290,037,005). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	8,881,972	7,038,915	1,843,057
Aset Lain-lain	14,950,000	14,950,000	0
Jumlah	23,831,972	21,988,915	1,843,057

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan

amortisasi.

Uang Muka
dari KPPN
Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp1,102,500

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,102,500 dan Rp2.205.000,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2018 tersebut bersumber sewa ruangan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp329,480,00

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp329,480,00 dan Rp3.776.561,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Tahun 2019
dan 2018

Uraian	TH 2019	TH 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	329.480	1.291.161
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	2.485.400
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	329.480	3.776.561

Ekuitas

Rp29,608,505,480

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29,608,505,480 dan Rp29.958.419.572,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

PNBP

Rp18.828,060,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp18,828,060,00 dan Rp35,990,480,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan	5,379,500	3,703,000	45
Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	6,448,560	32,287,480	(80)
Jumlah	11,828,060	35,990,480	(67)

Beban Pegawai

Rp10,947,422,277

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10,947,422,277 dan Rp12,526,547,600. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada PNS.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,427,611,700	3,637,180,192	(6)
Beban Pembulatan Gaji PNS	40,881	42,271	(3)
Beban Tunj. Suami/ Isteri PNS	274,366,010	284,587,758	(4)
Beban Tunj. Anak PNS	74,172,039	78,669,061	(6)
Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	5,333,620,000	6,379,580,000	(16)
Beban Tunj. PPh PNS	813,916,007	975,410,398	(17)
Beban Tunj. Beras PNS	144,260,640	161,206,920	(11)
Beban Tunj. Uang Makan PNS	493,005,000	545,766,000	(10)
Beban Tunj. Umum PNS	18,060,000	28,235,000	(36)
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	328,050,000	395,550,000	(17)
Jumlah	10,947,422,277	12,526,547,600	(13)

Beban Persediaan

Rp70,279,879

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp70,279,879 dan Rp53,807,200. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	70,279,879	53,807,200	
Jumlah	70,279,879	53,807,200	31

Beban Barang dan Jasa

Rp797,917,615

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Triwulan I 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp797,917,615 dan Rp717,739,227. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan peralatan dan mesin baik yang diperoleh dari anggaran belanja modal maupun hibah. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	425,470,806	448,250,948	(5.08)
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	2,956,500	3,559,500	(16.94)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,280,000	44,819,000	(1.20)
Beban Barang Operasional Lainnya	16,180,790	26,071,693	(37.94)
Beban Bahan	489,250	390,750	100
Beban Langganan Listrik	231,568,012	183,873,472	25.94
Beban Sewa	44,500,000	0	100
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	7,680,000	(100)
Beban Langganan Telepon	2,472,257	2,753,864	(10.23)
Jumlah	767,917,615	717,399,227	7.04

Beban

Pemeliharaan

Rp317,746,882

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp317,746,882 dan Rp320,803,902. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pemeliharaan peralatan dan mesin yang semakin bertambah. Rincian beban pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,126,215	191,083,228	(17.25)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142,187,509	107,081,874	32.78
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	17,433,158	22,638,800	(22.99)
Jumlah	317,746,882	320,803,902	(0.95)

Beban Perjalanan

Dinas

Rp39,822,781

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39,822,781 dan Rp39,360,000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat

koordinasi/sosialisasi yang meningkat terkait dengan Pembangunan Zona Integritas. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	38,472,781	35,310,000	8.96
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	4,050,000	-66.67
Jumlah	39,822,781	39,360,000	1.18

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp695,055,888

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp695,055,888 dan Rp674,292,082. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	422,572,145	411,216,950	1.99
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	259,715,527	254,644,866	-
Beban Penyusutan Irigasi	348,950	348,950	-
Beban Penyusutan Jaringan	1,368,456	1,368,456	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	9,822,104	5,484,154	3.08
Jumlah Penyusutan	693,827,182	673,063,376	3.08
Beban Amortisasi Software	1,228,706	1,228,706	-
Jumlah Amortisasi	1,228,706	1,228,706	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	695,055,888	674,292,082	3.08

Beban Penyisihan D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak
Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Surplus dari D.12 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non
Operasional
Rp3,191,424

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	7,821,000	0	100
Beban kerugian pelepasan aset	(9,348,930)	0	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA Yang Lalu	0	1,391	(100)
Penerimaan kembali belanja modal TAYL	0	7,260,548	(100)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	5,671,179	1,011,100	460.89
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	951,825	592,500	60.65
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3,191,424	7,680,539	(58.45)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

<i>Pos Luar Biasa</i>	D.13 Pos Luar Biasa
<i>Rp0</i>	Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i>	E.1 Ekuitas Awal
<i>Rp29,958,419,572</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29,958,419,572 dan Rp29,535,445,925.

<i>Defisit LO</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO
<i>Rp(12,853,555,318)</i>	Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(12,853,555,318) dan Rp(14,288,878,992). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

<i>Penyesuaian</i>	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset
<i>Nilai Aset</i>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.
<i>Rp0</i>	Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

<i>Koreksi Nilai</i>	E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan
<i>Persediaan Rp0</i>	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

<i>Selisih Revaluasi</i>	E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap
<i>Aset Tetap Rp0</i>	Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul

pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi Aset Tetap **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp(51.835.800).

Koreksi Lain-Lain **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Rp0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12,503,311,746 dan Rp14,763,688,439. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rp12,503,311,746

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	12,268,932,706
Diterima dari Entitas Lain	(18,546,560)
Transfer Masuk	161,035,600
Pengesahan Hibah Langsung	91,890,000
Jumlah	12,503,311,746

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja

pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp(18,546,560) sedangkan DKEL sebesar Rp12,268,932,706.

E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp91,890,000 yang diterima periode sampai dengan 31 Desember 2019.

Rincian Penerimaan Hibah Langsung periode sampai dengan 31 Desember 2019 disajikan pada lampiran II.

Ekuitas Akhir
Rp29,608,505,480

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29,608,176,000 dan Rp29,958,419,572.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada bulan Juni 2019, Pengadilan Agama Pekanbaru mendapat tambahan anggaran melalui Revisi BA-BUN yang mengakibatkan penambahan pagu anggaran 2019 khusus belanja barang dan belanja modal. Revisi BA-BUN tersebut meliputi belanja langganan internet, belanja bantuan sewa rumah dinas Hakim serta belanja modal pengadaan laptop hakim. Sementara itu belanja langganan listrik dan belanja tambahan perjalanan dinas juga mengalami penambahan melalui revisi DJA oleh Eselon I.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan

memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang di terima oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat biaya yang dititipkan oleh pihak ketiga yang ditampung pada rekening pemerintah lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keadaan Keuangan Perkara Per 31 Desember 2019					
	Saldo Awal 01 Januari 2019	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 31 Desember 2019	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	159,736,000	1,730,484,800	1,587,140,850	175,957,450	175,823,900	133,550
Biaya Eksekusi	58,512,900	91,697,000	47,909,000	102,300,900	102,171,800	129,100
Biaya Konsinyasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	218,248,900	1,822,181,800	1,635,049,850	278,258,350	277,995,700	262,650

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Total Akm. Peny. Perode ini	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2019	Per 31-12-2019	Per 31-12-2019	Per 31-12-2019	Per 31-12-2019
A	Tanah							
1	Tanah	-	18.399.971.000	-	-	-	-	18.399.971.000
	Jumlah		18.399.971.000	-	-	-	-	18.399.971.000
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	423.515.003	423.515.003	-	-	423.515.003	-
2	Alat Bengkel Bermesin	10	28.390.000	-	2.839.000	-	2.839.000	25.551.000
3	Alat Ukur	5	18.730.000	5.004.000	3.232.000	-	8.236.000	10.494.000
4	Alat Kantor	5	210.677.588	132.301.028	29.619.560	-	161.920.588	48.757.000
5	Alat Rumah Tangga	5	1.031.335.630	708.894.024	142.681.226	-	851.575.250	179.760.380
6	Alat Studio	5	34.398.000	12.388.600	4.406.000	-	16.794.600	17.603.400
7	Alat Komunikasi	5	42.677.250	27.223.450	5.053.800	-	32.277.250	10.400.000
8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	10.843.050	2.530.045	722.870	-	3.252.915	7.590.135
9	Komputer Unit	4	924.861.287	445.566.689	149.939.697	-	595.506.386	329.354.901
10	Peralatan Komputer	4	341.965.320	172.721.721	56.562.992	-	229.284.713	112.680.607
11	Alat Kerja Penerbangan	3	305.085.000	107.503.000	30.508.500	-	138.011.500	167.073.500
	Jumlah		3.372.478.128	2.037.647.560	425.565.645	-	2.463.213.205	3.372.478.128
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.924.778.240	232.793.363	145.505.418	-	378.298.781	6.546.479.459
2	Tugu/ Tanda Batas	50	1.651.396.000	82.569.800	33.027.920	-	115.597.720	1.535.798.280
3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.374.311.000	121.773.285	81.182.189	-	202.955.474	2.171.355.526
	Jumlah		10.950.485.240	437.136.448	259.715.527	-	696.851.975	10.253.633.265
D	Jaringan dan Irigasi							
1	Jaringan Listrik	40	54.738.200	16.421.459	1.368.456	-	17.789.915	36.948.285
2	Bangunan Air Irigasi	50	13.958.000	523.425	348.950	-	872.375	13.085.625
	Jumlah		68.696.200	16.944.884	1.717.406	-	18.662.290	50.033.910
E	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan							
1	Alat Bantu	7	0	420.000	-	(420.000)	-	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	14.000.000	28.000.000	-	(14.000.000)	14.000.000	-
3	Alat Kantor	5	0	59.126.000	-	(59.126.000)	-	-
4	Alat Rumah Tangga	5	136.000	128.159.445	9.703.354	(137.726.800)	136.000	-
5	Alat Studio	5	0	10.200.000	-	(10.200.000)	-	-
6	Alat Komunikasi	5	0	1.850.000	-	(1.850.000)	-	-
7	Unit Alat Laboratorium	8	0	190.000	-	(190.000)	-	-
8	Komputer Unit	4	0	46.730.500	-	(46.730.500)	-	-
9	Peralatan Komputer	4	950.000	10.253.850	118.750	(9.422.600)	950.000	-
	Jumlah		15.086.000	284.929.795	9.822.104	-279.665.900	15.086.000	0
Total			14.406.745.568	2.776.658.687	696.820.682	(279.665.900)	3.193.813.470	11.212.932.098

* Beban Amortisasi

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2019

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Pegawai PA Pekanbaru	Barang	DN	Rp 80.390.000	Rp 80.390.000	Rp -	-
2	Bank BRISyariah Cab. Pekanbaru	Barang	DN	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp -	-
3	Habibunnazar	Barang	DN	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000		
Jumlah				Rp 91.890.000	Rp 91.890.000	Rp -	